

Judul : Estafet Kepemimpinan Baru OJK
Tanggal : Kamis, 12 Maret 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 10

Estafet Kepemimpinan Baru OJK

Friderica Widayarsi Dewi disetujui sebagai Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan. Pimpinan baru OJK berjanji akan mereformasi sektor keuangan.

JAKARTA, KOMPAS — Komisi XI DPR telah menyetujui Friderica Widayarsi Dewi sebagai Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk periode 2026-2031 pada Rabu (11/3/2026). Keputusan ini diambil berdasarkan hasil rapat internal atas uji kelayakan dan keputusan 10 kandidat.

Selain Friderica, Komisi XI DPR juga menyetujui empat nama lainnya, yakni Hernawan Bektis Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK, serta Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK OJK).

Selain itu, Dicky Kartikoyono disetujui sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PRPK) OJK, serta Adi Budiarto sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK.

Ketua Komisi XI DPR Mukhlamad Misbakhun mengatakan, kelima anggota Dewan Komisiner OJK itu dipilih atas dasar musyawarah mufakat. Salah satu pertimbangan yang muncul adalah isu pembenahan fundamental kelembagaan.

"Kita menetapkan kembali Ibu Kiki (sebagai Ketua Dewan Komisiner OJK), karena dalam periode yang pendek, beliau bisa memberi respons yang positif terhadap beberapa persoalan fundamental di OJK," katanya saat ditemui di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam beberapa waktu terakhir, Friderica mengisi kekosongan di tampuk kepemimpinan OJK sebagai Pejabat Sementara (PJS) Ketua merangkap Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK. Selain itu, kekosongan jabatan juga diisi oleh Hasan, yakni sebagai PJS Kepala Eksekutif PMDK OJK.

Pengalaman itu pula yang kemudian menjadi dasar pertimbangan terpilihnya Hasan sebagai Kepala Eksekutif PMDK. Ia dinilai mampu memberikan

respons yang memadai atas beberapa isu yang mencuat di pasar modal Indonesia, khususnya terkait penilaian MSCI.

Misbakhun menambahkan, keputusan Komisi XI atas pemilihan lima anggota Dewan Komisiner OJK itu turut mempertimbangkan kemampuan, kapasitas, dan kompetensi. Aspek ini tercermin dalam paparan presentasi masing-masing kandidat saat menjalani uji kelayakan dan keputusan.

"Harapannya, mereka bisa memimpin OJK dengan baik membawa perubahan fundamental, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap OJK, pasar modal, dan industri jasa keuangan," ujarnya.

Kelima anggota Dewan Komisiner OJK yang telah terpilih itu akan menjabat selama periode 2026-2031. Selanjutnya, hasil keputusan Komisi XI DPR akan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (12/3/2026) ini.

Janji reformasi

Sebelumnya, para anggota Dewan Komisiner OJK terpilih telah memaparkan berbagai program terkait reformasi struktural sektor jasa keuangan. Secara umum, fokus utama mereka ialah meningkatkan kontribusi sektor keuangan bagi perekonomian dan transformasi kelembagaan OJK.

Friderica menyampaikan, reformasi pasar modal menjadi langkah strategis OJK ke depan. OJK juga akan memperkuat tata kelola dan integritas industri jasa keuangan, termasuk memperkuat penegakan hukum. "Bagaimana mengedepankan preventif, tapi juga kuratif. Kalau memang terjadi pelanggaran atau kita terindikasi, kita lakukan pemanggilan, pemeriksaan khusus, dan memberikan sanksi *enforcement*," katanya.

Ia menambahkan, OJK akan tetap menjalankan tugas utamanya, yakni menjaga stabilitas sistem keuangan. Tidak berhenti di situ, sektor jasa keuangan juga didorong untuk terus bertumbuh melalui ino-

Lima Nama Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan yang Baru

Friderica Widayarsi Dewi
Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Hernawan Bektis Sasongko
Wakil Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Hasan Fawzi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Dicky Kartikoyono
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen

Adi Budiarto
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto

Sumber: Dewan Perwakilan Rakyat

jasa keuangan, tetapi juga sebagai otoritas yang mampu mengarahkan pengembangan sektor keuangan agar lebih mendalam dan efisien, dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional," tuturnya.

Langkah perubahan juga mencuat dalam paparan presentasi Hasan yang mengusung misi berjudul reformasi integritas sektor pasar modal, keuangan derivatif, serta bursa karbon Indonesia.

Independensi

Secara umum, para anggota Dewan Komisiner OJK terpilih punya rekam jejak sebagai profesional di sektor jasa keuangan dalam rentang waktu cukup panjang. Peneliti senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Etikah Karyani, berpendapat, Friderica dan Hasan adalah figur internal OJK yang dapat menjamin kontinuitas pemahaman atas kompleksitas regulasi yang ada.

"Dari latar belakangnya, para calon memiliki rekam jejak yang relatif kuat di sektor masing-masing, baik dari regulator maupun industri," ujarnya.

Meski demikian, kredibilitas mereka akan teruji, terutama dalam kemampuannya untuk menjaga marwah independensi, memperkuat kepercayaan pasar, dan memastikan pengawasan yang konsisten di tengah dinamika sektor jasa keuangan yang semakin kompleks.

Menurut dia, OJK saat ini butuh pemimpin yang mampu menjaga marwah independensi regulator, memperkuat kepercayaan pasar, dan mengintegrasikan pengawasan lintas sektor sesuai mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Pasar saat ini sedang menguji seberapa jauh OJK bisa lepas dari pengaruh eksekutif, mengingat salah satu fungsi utama OJK setelah UU P2SK adalah turut memelihara stabilitas sistem keuangan secara aktif," katanya. (AGP)